

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke-3 Bulan Juni 2021 (tanggal 11 s.d. 17 Juni)

MENINGKATNYA PERILAKU SUAP PADA PELAYANAN PUBLIK

Sidiq Budi Sejati
Peneliti Pertama/Administrasi Publik
sidiq.sejati@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

ISU ATAU PERMASALAHAN

Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2021 yang diluncurkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perilaku suap dalam pelayanan publik di Indonesia cenderung memburuk. Hal ini diketahui dari masih adanya masyarakat baik itu warga atau pelaku usaha yang membayar suap atau diminta menyuap petugas dengan membayar lebih dari ketentuan ketika mengakses sebuah layanan publik. Munculnya celah suap ini akibat melemahnya pengawasan sebagai dampak perubahan pola kerja saat pandemi Covid-19.

Sepanjang tahun 2021, Ombudsman menerima peningkatan laporan dari masyarakat terkait dugaan mal-administrasi di beberapa sektor, seperti di sektor pendidikan adanya laporan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan peserta didik baru. Pada bidang kesehatan diduga terjadi pungli dalam program vaksinasi dan masih adanya laporan pungli ketika warga mengurus izin usaha.

Tahun ini IPAK mencapai skor 3,88 dari skala 5. Semakin besar skor maka masyarakat dianggap semakin antikorupsi. Indeks disusun berdasarkan survey dua dimensi, yakni persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap perilaku antikorupsi di keluarga, komunitas, dan publik. Skor dimensi persepsi masyarakat naik dari 3,68 pada 2020 menjadi 3,83 pada 2021 sedangkan skor pada dimensi pengalaman terjadi penurunan dari 3,91 pada 2020 menjadi 3,90 pada tahun 2021.

SUMBER

Kompas, 16 Juni 2021.